

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber pendukung untuk mendapatkan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian, acuan dasar ataupun perbandingan oleh peneliti terkait dengan fokus penelitian yang relatif sama sehingga dapat memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian Karya Tulis Ilmiah, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Deri Firmansyah, dkk. 2021. Kolaborasi *Quadruple Helix* dan *Quintuple Helix Innovation* Sebagai Solusi untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Keuangan: STIE Pasim Sukabumi.

Penelitian ini mengadopsi teori *Quadruple Helix* dan *Quintuple Helix Innovation*. Model *Quadruple Helix* menekankan kerjasama dinamis antara empat unsur otoritas publik, industri, universitas, dan masyarakat—untuk mencapai perkembangan dan kemajuan. Konsep ini adalah pengembangan dari *Triple Helix*, yang melibatkan kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari literatur seperti buku, artikel, dan situs web. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kolaborasi *Quadruple Helix* ini solusi untuk pemulihan ekonomi nasional dapat mengacu pada struktur, proses, input dan output. *Quintuple Helix Innovation* memandang lebih

komprehensif akan pentingnya kemampuan adaptasi dan kesesuaian interaksi dengan kondisi lingkungan sosial pada setiap proses dari struktur, proses itu sendiri, input dan output beserta evaluasinya. *Hexahelix* sebagai sintesa kualitatif dari QH dan QHI dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan Peran UMKM. Penelitian ini juga menawarkan solusi dan strategi secara normatif dalam perspektif pendekatan melalui adanya kolaborasi yang penting diimplementasikan bersama oleh para aktor guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih konkrit dalam perspektif ekonomi yaitu dengan mempertimbangkan peran dari aktor UMKM yang memerlukan dukungan *stakeholders* agar kembali bangkit dan tumbuh berkelanjutan ditambahkan dalam kerangka kerja kolaborasi.

2.1.2 Edi Suhandi, dkk. 2022. Kolaborasi *Pentahelix* dalam Optimalisasi Pemanfaatan Pentagon Aset dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gedepangrango Kecamatan Kududampit Kabupaten Sukabumi. *Internasional Seminar on Social Work Update 2022*.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan sampling jenuh kepada informan yang representative. Fokus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kolaborasi *pentahelix* dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset. Kolaborasi *Pentahelix* (Pemerintah, Mahasiswa, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media) dilakukan dalam rangka mengoptimalkan Pentagon Aset (Aset Manusia, Aset Fisik, Aset Natural, Aset Finansial, dan Aset Sosial) melalui pelaksanaan peran-peran setiap *helix* untuk

meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Gedepangrango secara berkelanjutan dengan melihat objek yang tersedia yaitu Kampung Lahang, Kampung Sawo, UMKM Pujasera Binangkit, Situ Gunung Suspension Bridge, Tanakita, dan Bank sampah melalui informan yaitu Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan, Penggiat Kampung Lahang, ketua RW Kampung Sawo, Manager CSR PT. Fontis Aquam Vivam, karyawan Tanakita, kader pemuda dan pelaku UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap *helix* yang ada di Desa Gedepangrango belum berkolaborasi secara optimal dalam memanfaatkan pentagon aset sesuai dengan perannya masing-masing. Optimalisasi pemanfaatan pentagon aset oleh *pentahelix* terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi terjadinya kolaborasi antar *helix* untuk mencapai keberdayaan masyarakat Desa Gedepangrango.

2.1.3 I Made Wimas Candranegara, dkk. 2022. *Hexahelix Concept in The Development of Eco-Tourism Area in The Kelating Traditional Village Eco-Tourism Area, Karambitan District, Tabanan Regency*. Universitas Jember.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis peran dan kontribusi dari setiap aktor dalam pengembangan area ekowisata di Desa Adat Kelating, serta untuk memberikan rekomendasi terkait dengan pengelolaan potensi kepada masyarakat lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai aktor untuk pengembangan area ekowisata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menerapkan konsep *Hexahelix* dalam pengembangan ekowisata di Desa Adat Kelating, yang melibatkan kolaborasi antara enam aktor untuk mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan. Penelitian ini

menggunakan metode campuran dengan fokus pada metode kualitatif yang diperkuat oleh metode penelitian kuantitatif.

Teori yang melandasi penelitian ini adalah Teori *Hexaxelix*. Teori *Helix* yang dipopulerkan oleh Etzkowitz dan Leydersdorff (1995) menjelaskan sebuah pendekatan dalam menciptakan sinergi kerjasama dari berbagai aktor yaitu Mahasiswa (A), bisnis (B), dan pemerintah (G) dalam konsep triple helix untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan. –berdasarkan ekonomi).

Hasil penelitian menunjukkan peran dan kontribusi masing-masing aktor dalam pengembangan area ekowisata di Desa Adat Kelating. Rekomendasi meliputi memprioritaskan pengelolaan potensi kepada masyarakat lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan berkolaborasi dengan berbagai aktor untuk pengembangan area ekowisata. Konsep *Hexahelix* digunakan dalam pengembangan ekowisata di Desa Adat Kelating, melibatkan kolaborasi antara enam aktor termasuk pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta, media, dan komunitas kreatif. Pendekatan ini menggabungkan kolaborasi enam aktor untuk mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Penelitian Peneliti

Penelitian Terdahulu				
No	Judul Penelitian	Teori yang Melandasi	Metode Penelitian	Temuan yang dihasilkan
1.	<i>Hexa Helix</i> : Kolaborasi <i>Quadruple Helix</i> dan <i>Quintuple Helix Innovation</i> Sebagai Solusi Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 (Deri Firmansyah: 2021)	Teori yang melandasi penelitian ini adalah <i>Teori Quadruple Helix</i> dan <i>Quintuple Helix Innovation</i> 1. Model inovasi <i>Quadruple Helix</i> merupakan model inovasi yang menekankan pada kerjasama antara empat unsur, yaitu otoritas public, industri, universitas/sistem pendidikan; dan komunitas masyarakat/pengguna yang bekerjasama secara dinamis dan membentuk helix yang saling overlapping menuju kearah perkembangan dan kemajuan (Widjajani,dkk. 2016). 2. Konsep <i>Quadruple Helix</i> adalah pengembangan dari <i>Triple Helix</i> . Model <i>Triple Helix</i> merupakan kolaborasi dinamis antar universitas,	Metode kualitatif deskriptif dan studi dokumentasi, dengan menggunakan dan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur, seperti buku-buku, artikel, home page untuk mengakses data informasi yang relevan dengan konsep <i>Quadruple Helix</i> dan <i>Quintuple Helix Innovation</i> yang diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Penggunaan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi dan gambaran yang jelas untuk menjawab permasalahan, yaitu bagaimana konsep quadruple helix dan quintuple helix innovation sebagai konsep yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk menemukan strategi pemulihan	1. Temuan menunjukkan bahwa konsep kolaborasi <i>Quadruple Helix</i> ini solusi untuk pemulihan ekonomi nasional dapat mengacu pada struktur, proses, input dan output. <i>Quintuple Helix Innovation</i> memandang lebih komprehensif akan pentingnya kemampuan adaptasi dan kesesuaian interaksi dengan kondisi lingkungan sosial pada setiap proses dari struktur, proses itu sendiri, input dan output beserta evaluasinya. <i>Hexa Helix</i> sebagai sintesa kualitatif dari QH dan QHI dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan peran UMKM. 2. Temuan penelitian ini menawarkan solusi dan strategi secara normatif dalam perspektif pendekatan melalui adanya kolaborasi yang penting diimplementasikan

		<p>industri dan pemerintah sehingga mengalami perkembangan dan kemajuan melalui pengoptimalan potensi ketiga unsur tersebut (Saepuloh, dkk. 2022).</p>	<p>ekonomi nasional pasca COVID-19. Serta hexa helix sebagai sintesa kualitatif keduanya yang dijadikan kerangka kerja kolaborasi untuk mendukung memperkuat solusi dan strategi menjadi semakin jelas, riil dalam perspektif pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>bersama oleh para aktor guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih konkrit dalam perspektif ekonomi yaitu dengan mempertimbangkan peran dari aktor UMKM yang memerlukan dukungan stakeholders agar kembali bangkit dan tumbuh berkelanjutan ditambahkan dalam kerangka kerja kolaborasi.</p>
2.	<p>Kolaborasi <i>Pentahelix</i> dalam Optimalisasi Pemanfaatan Pentagon Aset dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. (Edi Suhandi, dkk:2022)</p>	<p>Teori yang melandasi penelitian ini adalah konsep kolaborasi pentahelix untuk mengoptimalkan pentagon aset.</p> <p>1. Konsep <i>Penta-Helix</i> merupakan kegiatan kolaborasi atau kerjasama antar bidang dan actor. model ini dikenal dengan konsep ABCGM yaitu <i>Academician, Business, Community, Government</i>, dan <i>Media</i>. Kunci utama kesuksesan inovasi ini adalah adanya sinergi dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menjalankan. Model Penta</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan sampling jenuh kepada informan yang representatif yaitu Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan, Penggiat Kampung Lahang, ketua RW Kampung Sawo, Menejer CSR PT. Fontis Aquam Vivam, karyawan Tana Kita, kader pemuda dan pelaku UMKM.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan dalam upaya mengoptimalkan Pentagon Aset atau aset komunitas di Desa Gedepangrango tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor pemerintah namun adanya pihak lain yang berkontribusi dalam pengembangan masyarakat. Keterlibatan banyak pihak dapat dilihat dari bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh aktor Pentahelix yaitu pemerintah, perguruan tinggi, Perusahaan, masyarakat, dan media. Hasil penelitian merekomendasikan perlunya pengkajian lebih mendalam tentang adanya wujud kolaborasi yang dilakukan unsur Pentahelix dalam memanfaatkan Aset Komunitas yang ada di Desa Gedepangrango melalui</p>

		Helix sangat berguna untuk mengelola kompleksitas berbasis aktor (Slamet dkk, 2017:137).		Program Kampung Berseri Astra binaan PT. Astra International Tbk.
3.	<i>Hexahelix</i> Concept in The Development of Eco-Tourism Area in The Kelating Traditional Village Eco-Tourism Area, Karambitan District, Tabanan Regency. (I Made Wimas Candranegara, dkk :2022)	Teori yang melandasi penelitian ini adalah Teori <i>Hexaxelix</i> . Teori Helix yang dipopulerkan oleh Etzkowitz dan Leydersdorff (1995) menjelaskan sebuah pendekatan dalam menciptakan sinergi kerjasama dari berbagai aktor yaitu Mahasiswa (A), bisnis (B), dan pemerintah (G) dalam konsep <i>triple helix</i> untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan.–berdasarkan ekonomi).	Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan fokus utama pada metode kualitatif dan diperkuat dengan metode penelitian kuantitatif. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran masing-masing aktor dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manajer. Responden penelitian ini adalah wisatawan yang pernah mengunjungi kawasan ekowisata Desa Adat Kelating. Pengambilan sampel responden pada penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive</i> sampling. Wisatawan yang hadir pada rentang tahun 2019-2020 tercatat pada organisasi pengelola (Baga Usaha Padruwen Desa Adat) selaku pengelola kawasan ekowisata di Desa Adat Kelating yang berjumlah 86 jiwa (Sumber: data BUPDA).	Hasil penelitian menunjukkan peran dan kontribusi masing-masing aktor dalam pengembangan area ekowisata di Desa Adat Kelating. Konsep <i>Hexahelix</i> digunakan dalam pengembangan ekowisata di Desa Adat Kelating, melibatkan kolaborasi antara enam aktor termasuk pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta, media, dan komunitas kreatif.

Sumber: Data Peneliti 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui berbagai hasil penelitian yang menjadi salah satu sumber pendukung untuk dijadikan acuan dan perbandingan peneliti yang berkaitan dengan penelitian kolaborasi *Hexahelix* pengembangan ekonomi lokal. Persamaan yang mendasar dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai kolaborasi *Hexahelix*.

Hal yang membedakan penelitian yaitu penggunaan variabel, objek, dan lokasi penelitian, serta penggunaan prespektif pekerjaan sosial dalam pengembangan komunitas dan pekerjaan sosial setting industri. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan aktor *helix*, dalam penelitian terdahulu yang membahas mengenai peningkatan ekonomi menambahkan satu aktor penting yang terlibat yaitu peran UMKM, untuk itu peneliti menambahkan aktor yaitu pendamping UMKM sebagai aktor ke enam yang terlibat dalam pengembangan ekonomi lokal yang berfokus di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sebagai desa binaan PT Tirta Investama Klaten.

Kedudukan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada dasar teori penelitian. Peneliti menggunakan dasar teori kolaborasi dengan komponen keberhasilan kolaborasi yang mencakup komitmen personal (*personal commitment*), kemampuan berkomunikasi (*communication skill*), proses interaksi (*interaction processes*), program atau pelayanan (*program or services*) dan kesesuaian konteks (*context*) Friend and Cook, 2010 dalam Saleh, 2022:37). Komponen keberhasilan tersebut perlu di implementasikan dalam proses kolaborasi

dalam setting industri sebagai langkah untuk mencapai keberhasilan tanggung jawab sosial perusahaan oleh aktor *Hexahelix* yang terlibat dalam pengembangan ekonomi lokal sebagai program CSR diantaranya dunia usaha, pendamping UMKM, pemerintahan, Mahasiswa, media dan pelaku UMKM.

2.2 Kajian yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Kajian tentang Kolaborasi

2.2.1.1 Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi berasal dari bahasa latin yaitu *collaborate* yang berarti “bekerja bersama (*to work together*). Kolaborasi merupakan proses kerja sama secara intensif dari beberapa orang atau lembaga yang memiliki ‘irisan’ kepentingan yang sinergis dari dua pihak atau lebih. Kolaborasi merupakan sebuah keniscayaan bagi kehidupan masyarakat manusia yang berpredikat sebagai *human socio*, yaitu makhluk sosial yang tidak mungkin mampu hidup sendiri tanpa melibatkan keberadaan orang lain. Kolaborasi itu pada hakikatnya merupakan pola kerja sama yang dapat mempermudah, memperingan, dan mempercepat penyelesaian pekerjaan atau penanggulangan masalah yang rumit dan kompleks yang hanya dapat diselesaikan atau ditanggulangi melalui kerja sama yang diorganisasi secara baik dan benar (Sentanu, dkk. 2024:2)

Kolaborasi berasal dari bahasa Latin yaitu *collaborate* yang berarti bekerja sama (*to work together*). Kolaborasi dalam *The Social Work Dictionary* (Barker, 2014:78) dinyatakan sebagai berikut:

Collaboration is the process by which two or more professionals work together to serve a given client (individual, family, group, community, or population). The professionals may work relatively independently of one another but communicate and coordinate that respective efforts to avoid

duplication services, or they may work as members of a single helping team. Collaboration also takes place among social agencies and another organization on a variety of project.

Pernyataan tersebut mengartikan kolaborasi sebagai sebuah proses di mana dua atau lebih profesional bekerja sama untuk melayani klien tertentu (individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau populasi). Para profesional dapat bekerja relatif independen satu sama lain tetapi berkomunikasi dan mengoordinasikan upaya masing-masing untuk menghindari duplikasi layanan, atau mereka dapat bekerja sebagai anggota tim bantuan tunggal. Kolaborasi juga terjadi antara lembaga sosial dan organisasi lain dalam berbagai proyek.

Kolaborasi melibatkan proses komunikasi yang transparan dan terpercaya di mana semua pihak merasa mendapat informasi dan dapat memberikan umpan balik dan ide kepada orang lain dengan siapa mereka bekerja. Kolaborasi melibatkan pengambilan keputusan bersama, di mana aturan keputusan dipahami oleh semua orang dan semua pihak yang terlibat dapat menginformasikan atau mempengaruhi keputusan penting yang berpotensi berdampak pada mereka, terutama keputusan alokasi sumber daya (Sanghan, 2015 dalam Suhandi, 2022:16).

Konsep kolaborasi selalu mengalami perubahan yang dinamis, baik perubahan tentang konteks, konten, maupun tujuannya. Perubahan tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan dari masing-masing pihak yang berkolaborasi sehingga kolaborasi yang dibentuknya itu benar-benar memiliki manfaat yang optimal. Kolaborasi bukanlah suatu tujuan, tetapi sebagai metode, strategi, atau cara yang diharapkan dapat digunakan untuk mencapai tujuan secara optimal bagi mereka yang berkolaborasi.

2.2.2.2 Komponen Kolaborasi

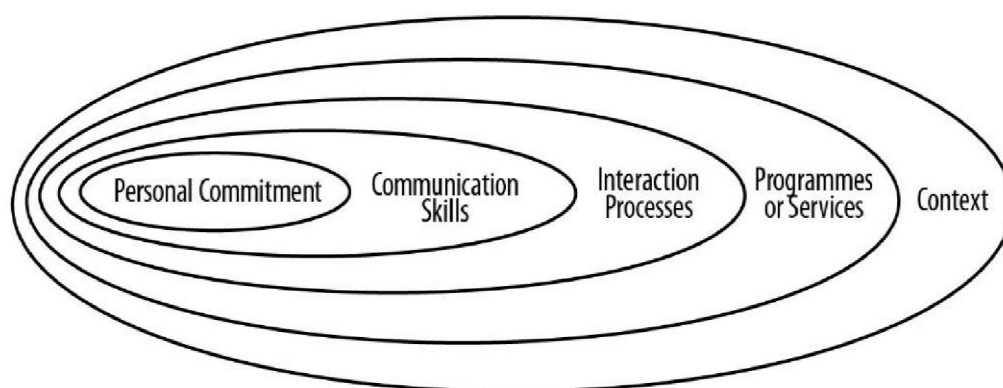
Kolaborasi yang dibentuk benar-benar bisa mendapatkan kinerja yang optimal sebagaimana yang diharapkan, bangunan kolaborasi yang didirikan oleh para kolaborator itu harus dilengkapi dengan beberapa komponen kolaborasi yang kokoh (Friend dan Cook, 2010 dalam Saleh, 2022:37) menyatakan bahwa setiap bentuk kolaborasi harus memiliki minimal lima komponen yang meliputi hal berikut.

1. *Personal commitment* (komitmen personal), yaitu sebuah janji setia atau kepatuhan dari masing-masing anggota kolaborasi dalam menjalankan kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.
2. *Communication skills* (kemampuan berkomunikasi), yaitu sebuah kemampuan para anggota dalam mengolah dan menyikapi berbagai informasi yang masuk, yang selanjutnya dikomunikasikan secara lugas, cepat, tepat, dan akurat kepada pihak policy maker agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi keberadaan dan proses kerja kolaborasi.
3. *Interaction processes* (proses interaksi), yaitu setiap anggota kolaborasi dituntut untuk saling berinteraksi secara efisien dan efektif, terkait dengan pelaksanaan kerja, baik atas pekerjaan yang bersifat *routinized work* maupun *non routinized work*.
4. *Program or services* (program atau pelayanan), kehidupan kolaborasi semua pihak atau para anggota kolaborasi itu harus selalu bekerja berdasarkan program-program yang telah disusun secara sistematis dan prosedural serta selalu bersedia

secara sukarela untuk saling memberikan pelayanan kepada semua anggota, terkait dengan pelaksanaan atau penyelesaian sebuah program tertentu.

5. *Context* (konteks), yaitu setiap anggota organisasi harus melaksanakan pekerjaan atau menjalankan kewajibannya sesuai dengan konteks yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa fokus dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka masing-masing.

Kelima komponen tersebut saling berkorelasi antara satu dan lainnya yang oleh Friend dan Cook, 2010 dalam Saleh 2022:37 diilustrasikan melalui gambar di bawah ini.



Gambar 2. 1 Komponen Kolaborasi

Sumber: Friend & Cook, 2010 dalam Saleh 2022:37

Berdasarkan gambar tersebut, (Fiend & Cook 2010 dalam Saleh 2022:37) menjelaskan hal berikut. Pertama, titik tekan penyelenggaraan kolaborasi terletak pada komponen komitmen yang telah disepakati oleh para kolaborator. Adanya komitmen dari para individu yang berkolaborasi tersebut dijadikan sebagai peranti dalam menetapkan tanggung jawab para individu dalam menjalankan tugasnya yang meliputi kepercayaan para individu tentang besarnya manfaat yang bisa

diperoleh melalui kerja sama yang ia lakukan bersama para kolega ataupun anggota tim serta kepercayaan mereka terhadap manfaat yang diperoleh melalui proses belajar dengan pihak-pihak lain.

Kedua, kemampuan berkomunikasi masing-masing individu, terutama yang terkait dengan konteks kerja sama antar anggota. Para kolega dan para profesional ataupun dengan anggota komunitas lainnya yang relevan dengan cara memahami berbagai budaya yang berbeda serta latar belakang bahasa yang berbeda-beda pula. Ketiga, proses interaksi masing-masing individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan konseptualisasi tentang sebuah aktivitas yang terkait dengan pemecahan masalah. Di samping itu, juga yang terkait dengan kemauan mereka untuk berkonsultasi dengan orang-orang terkait yang relevan serta yang memiliki kemampuan atau keahlian berkomunikasi dalam melakukan negosiasi terkait dengan hal-hal yang mendasar. Keempat, dalam sebuah kolaborasi harus dicantumkan komponen tentang penyusunan program dan pemberian layanan yang berkaitan dengan konteks kolaborasi itu sendiri. Dalam hal ini, program dan pelayanan harus terfokus pada program-program kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis atau bidang yang dikolaborasikan. Kelima, komponen konteks sebagai komponen yang terakhir merujuk pada kebutuhan tentang lingkungan, yaitu lingkungan ideal yang seperti apakah yang dibutuhkan oleh kolaborasi itu dalam menjalankan aktivitasnya.

Bagi semua pihak, baik secara personal maupun secara kelembagaan yang hendak membangun kolaborasi, mereka harus meyakinkan terlebih dahulu apakah kolaborasi yang akan dibentuk atau didirikan itu telah memiliki konsep yang kuat

tentang lima komponen tersebut. Masing-masing pihak harus saling mempelajari, memahami, dan membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang deskripsi lengkap yang tertuang dalam masing-masing komponen. Apabila mereka sudah mencapai kesepakatan yang bulat dan tidak ada salah satu calon kolaborator yang merasa dirugikan baik secara material maupun nonmaterial, baru mereka diperkenankan untuk menandatangani akta kesepahaman atau agreement atas pendirian kolaborasi. Hal ini agar pada kemudian hari tidak terjadi konflik antaranggota yang disebabkan oleh adanya berbagai aspek yang merugikan salah satu pihak.

2.2.2 Kajian tentang Model *Hexahelix*

Konsep model *Hexahelix* adalah konsep pemetaan pemangku kepentingan secara komprehensif. Konsep model *Hexahelix* merupakan kolaborasi *quadruplehelix* dan *quintuple helix innovation* sebagai solusi yang mampu mewujudkan percepatan program-program yang telah ditetapkan melalui sinergi antar elemen yang ada (Firmansyah, dkk. 2022:494). Konsep *helix* didasarkan pada gagasan bahwa kolaborasi antaraktor dalam pembangunan multi sektor penting dilakukan karena proses, tujuan, dan tantangan – tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks (Kelvin, dkk. 2022 dalam Anisykurillah, 2024:189).

Konsep model *Hexahelix* memaksimalkan peran ganda yang dimainkan oleh aktor untuk mencapai tujuan bersama (Firmansyah, dkk. 2022:494). Kunci keberhasilan model ini adalah sinergi dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan. Selain mempermudah pencapaian tujuan pemberdayaan, kolaborasi *Hexahelix* juga membantu mencegah *overlapping* kebijakan dan program antar pemangku kepentingan. Dunia usaha atau badan usaha menjadi lokomotif yang

menggerakkan kolaborasi para pemangku kepentingan dan mendorong pembangunan masyarakat. Enam komponen yang terlibat dalam pelaksanaan proyek CSR adalah Mahasiswa, dunia usaha, komunitas atau society, pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan media.

1. Mahasiswa (akademik)

Mahasiswa berperan sebagai konseptor melalui penelitian untuk mengungkap dan menggali potensi dan peluang pengembangan proyek CSR di desa penerima. Mahasiswa berperan dalam memberikan perspektif dan analisis berdasarkan objektivitas data lapangan mengenai tingkat pembangunan dan formula yang tepat untuk keberhasilan program, selain itu para Mahasiswa juga dapat membantu pengembangan program CSR melalui konsep Tri Dharma di perguruan tinggi untuk dapat memunculkan konsep pengembangan masyarakat sebagai program CSR yang memenuhi kebutuhan dan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, maka civitas akademika perlu terlibat aktif sejak tahap perencanaan.

2. Dunia Usaha

Pelaksanaan program kerjasama *Hexahelix*, sektor dunia usaha dapat melaksanakan peran yang berbeda. Dunia usaha dapat berperan sebagai pendamping dalam proses pengembangan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Berikut beberapa peran sektor bisnis:

- 1) Dunia usaha dapat berperan sebagai fasilitator dan membantu menciptakan suasana kondusif bagi pengembangan masyarakat.

- 2) Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dunia usaha dapat berperan sebagai inisiator program pengembangan masyarakat.
- 3) Pendamping desa dan menjadi penghubung dengan pemerintah atau instansi terkait untuk membantu penanganan urusan administratif.
- 4) Membantu akselerasi dalam percepatan penanaman modal pada masyarakat desa dan pengembangan perekonomian tingkat desa.
- 5) Memfasilitasi Infrastruktur teknis, permodalan dan jaringan usaha yang ada.
- 6) Sebagai mobilisator sosial agar masyarakat desa tetap berada dalam payung pengelolaan pembangunan sehingga keberhasilan desa binaan menjadi lebih terukur.
- 7) Membantu dalam branding, periklanan dan penjualan produk pedesaan yang berkualitas.
- 8) Memberikan pendidikan atau pelatihan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan diri atau desanya.

3. Komunitas

Masyarakat dapat berperan sebagai akselerator dan penghubung antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Komunitas dalam hal ini dapat berupa masyarakat umum atau orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan atau ketertarikan terhadap suatu isu tertentu. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan dalam setiap kegiatan pengembangan masyarakat. masyarakat tidak lagi menjadi objek dalam proses pembangunan, melainkan subjek. Masyarakat yang ada dalam bentuk kelompok

tertentu dapat berkontribusi pada wilayah tertentu sesuai rencana strategis untuk membantu mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

4. Pemerintah

Pemerintah dalam model *Hexahelix* berperan sebagai regulator yang memiliki fungsi membuat regulasi. Pemerintah dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi pembuatan kebijakan-kebijakan terkait pengembangan masyarakat. Pelaksanaan prosesnya, pemerintah yang pasti terlibat adalah Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota apabila diperlukan. Instansi pemerintahan lain yang terlibat dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan desa yang bersangkutan.

5. Media

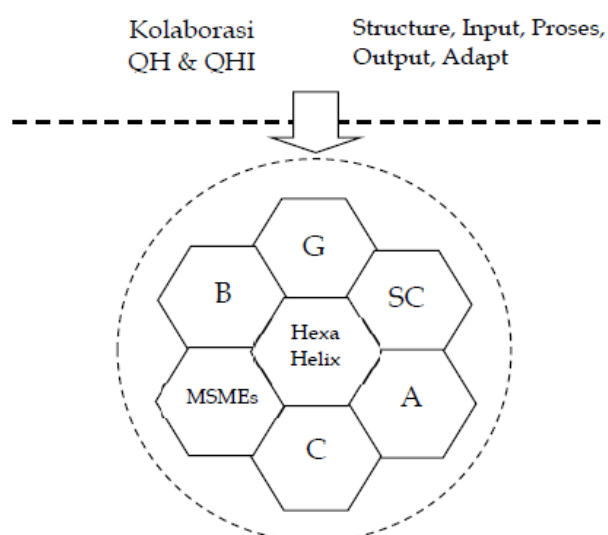
Media dalam pengembangan desa binaan dapat berperan sebagai *expander* untuk mendukung publikasi dalam promosi dan informasi (Saputra & Ulum, 2022:2). Media memiliki kemampuan untuk membangkitkan perhatian, memprovokasi aksi, melemahkan penentangan, serta menunjukkan kekuatan komitmen dan dukungan, dengan adanya peran tersebut diharapkan dapat mengobarkan semangat pengembangan masyarakat yang berkelanjutan kepada khalayak luas.

6. Peran UMKM

Aktor UMKM yang merupakan bagian dari dimensi industri/bisnis dipertimbangkan untuk ditambahkan kedalam helix sehingga menjadi enam *helix*, familiar dengan *Hexahelix*. *Hexahelix* muncul sebagai sintesa kualitatif dari hasil

kolaborasi QH dan QHI dan untuk melengkapi solusi-strategi pemulihan ekonomi nasional hingga ekonomi mengalami pertumbuhan dengan adanya keterlibatan dan kebangkitan UMKM nasional (Firmansyah, dkk. 2022:493).

Keterlibatan UMKM sebagai penyeimbang tujuan yang sekaligus sebagai penggerak hidupnya kembali aktivitas ekonomi sehingga berdampak langsung tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Langkah yang dapat dilakukan para aktor *Hexahelix* yang telah bersinergi dalam kerangka kerja kolaborasi berkelanjutan bertujuan untuk memperkuat kebangkitan UMKM sebagai aktor yang dapat memperkaya solusi dan strategi yang ada dalam upaya pemulihan ekonomi bahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan dengan mengoptimalkan kompleksitas peran masing-masing aktor yang terlibat dalam kerjasama *Hexahelix*, memaksimalkan peran ganda yang diemban para aktor *helix* guna pencapaian tujuan bersama (Firmansyah, dkk. 2022:494).



Gambar 2. 2 *Hexa Helix* Model, QH & QHI Collaboration Sustainability Output
Sumber: (Hasil Sintesis Authors, Firmansyah, dkk. 2021).

2.2.3 Kajian tentang Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

2.2.3.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL)

Canzanelli (2001:9) dalam (Huda 2020: 160) mendefinisikan PEL merupakan proses partisipatif yang mendorong dan memberikan jalan kepada stakeholders lokal untuk meningkatkan daya saing lokal dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan yang layak dan menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. (International Labour Organization (ILO), 2005: 6) dalam Huda 2020: 160) mendefinisikan PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan di wilayah tertentu untuk melakukan pembangunan bersama dengan memanfaatkan sumber daya lokal guna menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang kegiatan ekonomi.

World Bank (2003:1) mendefinisikan PEL sebagai suatu proses di mana masyarakat, lembaga usaha, dan organisasi nonpemerintah bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan pekerjaan pada tingkat lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua. Berdasarkan beberapa uraian pengertian PEL tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PEL adalah usaha untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lokal baik pemerintah, swasta, organisasi nonpemerintah, dan sektor publik dengan tujuan menciptakan lapangan kerja, menciptakan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan, serta mampu menggali potensi ekonomi lokal yang produktif dan berdaya saing.

Terkait dengan PEL, Meyer-Stamer (2005: 4) menjabarkan terdapat enam aspek dalam PEL, yaitu: (1) Kelompok sasaran pengembangan ekonomi lokal; (2) Faktor lokasi; (3) Sinergi; (4) Pembangunan berkelanjutan yang melihat pada aspek ekonomi, ekologis, dan sosial; (5) Tata pemerintahan terdiri dari kemitraan dengan sektor publik dan swasta, perampangan regulasi di sektor publik dan pengembangan organisasi; (6) Manajemen, pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada proses berulang dengan landasan diagnostik dan perencanaan, implementasi, dan monitoring serta evaluasi. Dari enam aspek tersebut tentu menjadi ukuran pada pelaksanaan atau implementasi PEL.

2.2.3.2 Prinsip Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL)

Rahma, 2012 dalam Rozikin, 2021:124 menyatakan terdapat sejumlah prinsip utama yang mendasari konsep pengembangan ekonomi lokal di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan utama yang dihadapi daerah sehingga strategi PEL harus memprioritaskan pada peningkatan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan
- 2) PEL harus menetapkan target pada masyarakat kurang beruntung, pada area dan masyarakat yang cenderung termarjinalkan pada usaha mikro dan kecil sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi nyata dalam kehidupan ekonomi setempat
- 3) Setiap daerah perlu mengembangkan dan memiliki sendiri strategi PEL yang sesuai dengan kondisi daerahnya

- 4) PEL mendukung kepemilikan lokal, keterlibatan masyarakat, kepemimpinan lokal dan pengambilan keputusan bersama
- 5) PEL menuntut terbangunnya kemitraan antara masyarakat, sektor usaha dan swasta serta pemerintah daerah untuk memecahkan masalah bersama
- 6) PEL memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. kemampuan. ketrampilan dan peluang bagi pencapaian berbagai tujuan
- 7) PEL memberikan keleluasaan bagi daerah untuk merespon perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Adapun sasaran jangka panjang dari penerapan pendekatan PEL adalah pengentasan kemiskinan dan perbaikan yang terus menerus dan berkelanjutan dalam kualitas kehidupan dari suatu komunitas lokal di suatu daerah/wilayah. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut pengembangan ekonomi lokal memiliki tujuan yaitu:

- 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah
- 2) Menciptakan dan pemeratakan kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat;
- 4) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah atau negara lain
- 5) Membangun dan mengembangkan kerja sama yang positif antar daerah (Rahma, 2012 dalam Rozikin 2021:124).

2.2.4 Kajian tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2.2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempromosikan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Menurut Schermerhorn, 1993 yang diikuti dalam Suharto (2009:102), CSR adalah upaya organisasi bisnis dalam melayani kepentingan internal dan eksternal dengan caranya sendiri. Dalam konsep ini, perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial ke dalam operasi bisnisnya serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryanan, 2005 dalam Suharto, 2009:103).

Selain itu, ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* juga memberikan definisi CSR. ISO 26000 yang dikutip dalam Suharto, 2009:104, CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Suharto 2009:105, pendefinisian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan bisa dioperasionalkan untuk kegiatan audit adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Buttom Lines* (Elkington, 1998 dalam Suharto 2009:105) dan menambahkannya dengan satu *line* tambahan yakni *procedure*. Dengan demikian, CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen atau kewajiban perusahaan dalam berperan dan memberikan kontribusi dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan perusahaan itu sendiri, masyarakat setempat, dan masyarakat secara luas.

2.2.4.2 Jenis-Jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kotler dan Lee dalam Kartini (2020:63), terdapat enam kategori program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang dikenal sebagai *The Six Social Initiative*. Pemilihan program CSR oleh perusahaan tergantung pada inti bisnis perusahaan dan Analisis kebutuhan (*need assessment*). Berikut adalah jenis program CSR tersebut:

1. Cause Promotions

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber dana lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kepedulian masyarakat terhadap suatu masalah sosial, merupakan fokus utama dari kategori CSR ini.

2. Cause Related Marketing

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan presentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan

kepada penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu. Perusahaan setuju untuk menyumbangkan sebagian dari keuntungan perusahaan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu.

3. *Corporate Social Marketing*

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye ini berfokus pada isu-isu seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keterlibatan komunitas..

4. *Corporate Philanthropy*

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan dengan memberikan sumbangan langsung berupa dana, jasa, atau alat kepada pihak yang membutuhkan, baik itu institusi, individu, maupun kelompok tertentu. Kegiatan filantropi biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan, contohnya adalah memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu. Selain itu, perusahaan juga dapat menyumbangkan barang atau produk, misalnya memberikan alat tulis kepada siswa di sekolah terbuka.

5. *Community Volunteering*

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, mitra bisnis, atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang mnejadi sasaran program. Perusahaan mengatur kehadiran

karyawan dan berpartisipasi dalam program CSR yang dilaksanakan, misalnya melibatkan staf pengajar.

6. *Social Responsible Business*

Aktivitas CSR ini, perusahaan melakukan perubahan pada salah satu atau seluruh sistem kerjanya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Perusahaan dapat meningkatkan tanggung jawab sosialnya melalui perbaikan proses produksi, seperti penyaringan limbah produksi sebelum dibuang, pengurangan zat pencemar, penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang, dan berbagai langkah.

2.2.4.3 Model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Said dan Abidin (2004:64-65) menyatakan setidaknya terdapat empat model tanggung jawab sosial perusahaan yang umum digunakan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Keterlibatan langsung.

Perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan kegiatan sosialnya sendiri atau memberikan donasi kepada masyarakat tanpa perantara. Perusahaan biasanya mengangkat seorang manajer atau menjadi bagian dari manajer humas, pejabat senior seperti sekretaris perusahaan atau manajer humas.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grup. Model ini merupakan model adopsi yang sering digunakan oleh perusahaan di

negara maju. Perusahaan biasanya menyediakan modal awal, dana rutin, atau donasi yang dapat digunakan secara rutin untuk menjalankan dana tersebut.

3. Bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial bekerja sama dengan lembaga sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), otoritas, perguruan tinggi atau media baik dalam mengelola dana maupun dalam melakukan kegiatan sosial.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Perusahaan mendirikan, menjadi anggota atau mendukung organisasi sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lain, model ini lebih berorientasi pada pemberian hibah operasional yang merupakan “hibah pembangunan”. Mitra konsorsium atau lembaga sejenis yang dipercaya oleh perusahaan pendukungnya secara proaktif mencari mitra dari lembaga operasional kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

2.2.4.4 Prinsip dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan seharusnya mengutamakan prinsip-prinsip utama. Crowther dalam Saswito (2020:81) menyatakan terdapat tiga prinsip utama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi CSR, yaitu:

1. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Prinsip ini mengacu pada tindakan yang diambil saat ini yang akan berdampak pada masa depan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga operasi perusahaan agar berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. Pertanggung Jawaban (*Accountability*)

Prinsip ini dalam konteks organisasi mencakup identifikasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada lingkungan eksternal. Perusahaan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan harus menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut baik secara internal maupun eksternal.

3. Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan ini melibatkan pelaporan yang jelas mengenai dampak yang ditimbulkan pada pihak-pihak yang terkait. Keterbukaan merupakan prinsip yang terkait erat dengan dua prinsip sebelumnya dan mencakup pengakuan tanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi pada pemangku kepentingan. Prinsip ini juga dapat dipahami sebagai proses memberikan wewenang kepada pemangku kepentingan dan melibatkan mereka secara aktif. Transparansi juga berfungsi sebagai alat kontrol karena perusahaan menerapkan prinsip ini.

2.2.5 Kajian tentang Pekerjaan Sosial

2.2.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Asosiasi pekerja sosial di Amerika (*The National Association of Social Workers*) dalam Zastrow (2017: 4), mendefinisikan bahwa pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang membantu individu-individu, kelompok-kelompok, atau masyarakat-masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan keberfungsian sosial mereka dan menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan.

Selanjutnya Asosiasi pekerja sosial di Amerika (*The National Association of Social Workers*) juga merumuskan tujuan pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Membantu individu dan kelompok mengidentifikasi dan memecahkan masalah secara maksimal agar bisa keluar dari ketidakseimbangan atau kekurangharmonisan interaksi diri mereka dengan lingkungannya.
 2. Mengidentifikasi potensi penyebab ketidakseimbangan antara individu atau kelompok dengan lingkungannya untuk mencegah agar ketidakseimbangan tersebut terjadi.
 3. Tujuan preventif dan kuratif tersebut juga untuk mencari, mengidentifikasi, dan memperkuat potensi individu, kelompok, dan komunitas agar maksimal.
- (Morales dan Sheafor, 1983: 13 dalam Sukoco, 2021:30)

2.2.5.2 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerja Sosial dalam melaksanakan proses pertolongan menggunakan metode, metode tersebut yaitu membantu individu (*social case work*), metode pekerjaan sosial kelompok (*social group work*), metode pengembangan masyarakat (*community development*), dan metode pengorganisasian masyarakat (*community organization*). Dalam praktik pekerjaan sosial generalis dikenal dengan istilah praktik mikro, meso, dan makro.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode *Social Group Work* (Sukoco, 2021:24) menjelaskan bahwa “*Group Wrok berusaha mjemfaatkan kelompok sebagai alat untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang diinginkan guna meningkatkan fungsionalitas social orfang..*”

2.2.5.3 Sistem Sumber Pekerjaan Sosial

Allen Pincus dan Anne Minahan, 1973 dalam Sukoco, 2021:51 mengklasifikasikan sumber ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

a. Sistem sumber informal atau alamiah (*informal or natural resource systems*).

Sistem sumber informal atau alamiah dapat berupa keluarga, teman, tetangga, maupun orang-orang lain yang bersedia membantu. Bantuan yang dapat digali dan dimanfaatkan dari sumber-sumber alamiah tersebut adalah dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan pelayanan-pelayanan kongkrit lainnya, seperti pinjam uang.

b. Sistem sumber formal (*formal resource systems*).

Sistem sumber formal adalah keanggotaannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sistem sumber tersebut juga dapat membantu anggotanya untuk bernegosiasi dan memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

c. Sistem sumber kemasyarakatan (*societal resource system*).

Sistem sumber kemasyarakatan dapat berupa rumah sakit, badan-badan sosial, badan-badan adopsi, program-program latihan kerja, pelayanan-pelayanan resmi, dan sebagainya. Orang di dalam kehidupannya terkait dengan sistem sumber kemasyarakatan, seperti sekolah, pusat-pusat perawatan anak, penempatan-penempatan tenaga kerja, program program tenaga kerja, dan sebagainya.

Naomi I. Brill dan Leonara Serafica-de Guzman dalam Sukoco, 2021: 130, menegaskan bahwa salah satu keterampilan pekerjaan sosial adalah keterampilan membangun kemitraan (*establishing partnership*) menunjukkan kemampuan pekerja sosial dalam mengajak klien dan orang-orang atau sistem sosial yang terkait (*significant others*) dalam usaha pemecahan masalah. Pihak-pihak terkait tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

a) Sistem klien yaitu sistem yang akan dibantu.

Jadi kegiatan intervensi pemecahan masalah hendaknya ditujukan demi kepentingan sistem klien.

b) Sistem sasaran yaitu suatu sistem yang hendak terkena intervensi. Sistem sasaran merupakan sistem yang akan diubah. Dengan perubahan pada sistem sasaran diharapkan dapat memperbaiki dan memecahkan permasalahan sistem klien.

c) Sistem kegiatan yaitu sistem yang dapat diajak serta oleh pekerja sosial dalam mengubah atau mengintervensi sistem sasaran.

d) Sistem pelaksanaan perubahan yaitu sistem yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kegiatan pemecahan masalah tersebut.

2.2.6 Kajian tentang Pekerja Sosial dengan Industri

2.2.6.1 Pengertian Pekerjaan Sosial Industri

Pekerjaan Sosial Industri (PSI) dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik Pekerjaan Sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dan lingkungannya, terutama lingkungan kerja. PSI dapat menangani beragam kebutuhan individu dan keluarga, relasi dalam perusahaan, serta relasi yang lebih luas antara tempat kerja dan masyarakat yang dikenal dengan istilah tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Suharto, 2006:7).

PSI menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai Pekerjaan Sosial dalam pemberian pelayanan, program dan kebijakan bagi para pegawai dan

keluarganya, manajemen perusahaan, serikat-serikat buruh dan bahkan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Sebagaimana dinyatakan Akabas inti PSI meliputi kebijakan, perencanaan dan pelayanan sosial pada persinggungan antara Pekerjaan Sosial dan dunia kerja (Suharto, 2006:7). Kegiatan PSI antara lain adalah program bantuan (bagi) pegawai, promosi kesehatan, manajemen perawatan kesehatan, tindakan afirmatif (pembelaan), penitipan anak, perawatan lanjut usia, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan organisasi, pelatihan dan pengembangan karir, konseling bagi penganggur atau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), tunjangan-tunjangan pegawai, keamanan dan keselamatan kerja, pengembangan jabatan, perencanaan sebelum dan sesudah pensiun, serta bantuan pemindahan posisi kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui apabila pekerja sosial industri memiliki peran yang mencakup internal dan eksternal dari perusahaan. Peran internal ditunjukkan dengan melakukan program dukungan karyawan seperti layanan konseling, terapi kelompok dan pengembangan staf. Peran eksternal tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti: *Community Development*, *social political Development* dan *social impact*, yang perwujudannya juga merupakan bentuk dari program *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

2.2.6.2 Tugas Pekerja Sosial Industri

Pekerja Sosial sebagai agen perubahan yang bertugas mewujudkan keberfungsian sosial masyarakat agar terciptanya kesejahteraan sosial memiliki peran-peran tersendiri dalam menjalankan praktiknya. Johnson (1984:263-264)

menyatakan terdapat tiga bidang tugas pekerja sosial yang bekerja di perusahaan:

1) Kebijakan, perencanaan dan administrasi.

Bidang ini umumnya tidak melibatkan pelayanan sosial secara langsung. Sebagai contoh, perumusan kebijakan untuk peningkatan karir, pengadministrasian program-program tindakan afirmatif. Pengkoordinasian program-program jaminan sosial dan bantuan sosial bagi para pekerja, atau perencanaan kegiatan-kegiatan sosial dalam departemen-departemen perusahaan.

2) Praktik langsung dengan individu, keluarga dan populasi khusus.

Tugas pekerja sosial dalam bidang ini meliputi intervensi krisis (*crisis intervention*), asesmen (penggalan) masalah-masalah personal dan pelayanan rujukan, pemberian konseling bagi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, pelayanan dan perawatan sosial bagi anak-anak pekerja dalam perusahaan atau organisasi serikat pekerja, dan pemberian konseling bagi para pensiunan atau pekerja yang menjelang pensiun.

3) Praktik yang mengkombinasikan pelayanan sosial langsung dan perumusan kebijakan sosial bagi perusahaan.

Pekerja sosial telah memberikan kontribusi penting dalam memanusiawikan dunia kerja, mereka umumnya terlibat dalam pemberian konseling di dalam maupun di luar perusahaan, pengorganisasian program-program personal, konsultasi dengan manajemen dan serikat-serikat pekerja mengenai konsekuensi kebijakan-kebijakan perusahaan terhadap pekerja, serta bekerja dengan bagian kesehatan dan kepegawaian untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dan kualitas tenaga kerja.

Straussner menyatakan terdapat satu cara lagi untuk mengkonseptualisasikan beragam pelayanan sosial yang diberikan pekerja sosial beserta peranan dan keterampilan yang dijalankannya adalah dengan membuat sebuah tipologi model setting PSI (Straussner, dalam Suharto, 2009: 16), yaitu sebagai berikut:

- 1) Model pelayanan sosial bagi pegawai (*the employee service model*)
- 2) Model pelayanan sosial bagi majikan atau organisasi perusahaan (*the employer-work organization service model*)
- 3) Model pelayanan sosial bagi konsumen (*the consumer service model*)
- 4) Model tanggung jawab sosial bagi perusahaan (*the corporate social responsibility model*) atau model investasi sosial perusahaan (*the corporate social investment*)
- 5) Model kebijakan di bidang kepegawaian (*work related public policy model*)

2.2.6.3 Peran Pekerjaan Sosial Industri

Peranan-peranan Pekerja sosial tradisional, seperti konselor, mediator, konfrontator konstruktif, pembela dan broker adalah beberapa peranan yang paling sering dimainkan oleh pekerja sosial (Suharto 2009:17), peranan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Konselor: Pekerja sosial memberikan asesmen dan konseling terhadap individu, keluarga atau kelompok. Pekerja sosial membantu mereka mengartikulasikan kebutuhan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, memahami dinamika atau penyebab masalah, menggali berbagai alternatif dan solusi, serta

mengembangkan kemampuan mereka secara lebih efektif dalam menghadapi permasalahan.

- 2) Konfrontation Konstruksi: Pekerja Sosial membantu individu yang mengalami kecanduan obat atau alkohol. Pecandu obat atau alkohol seringkali menyangkal perbuatannya, sehingga diperlukan pendekatan konstruktif yang secara khusus dikembangkan untuk menghadapi kenyataan ini.
- 3) Broker: Pekerja sosial menghubungkan pegawai yang dibantunya dengan sumber-sumber yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan.
- 4) Pembela: Pekerja sosial membantu karyawan/pegawai memperoleh pelayanan dan sumber, yang karena suatu sebab, tidak bisa diperolehnya sendiri
- 5) Mediator: Tugas utama pekerja sosial dalam menjalankan peranan ini adalah menjembatani konflik antar dua atau lebih individu atau sistem serta memberikan jalan keluar yang dapat memuaskan semua pihak berdasarkan prinsip-prinsip sama-sama diuntungkan.
- 6) Konsultan: Pekerja sosial bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kemampuan pihak perusahaan dalam memahami berbagai aspek dinamika organisasi dan kemanusiaan, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah.
- 7) Analisis/Evaluator: Pelaksanaan peranan ini, pekerja sosial mengidentifikasi dan menerapkan program-program baru guna memenuhi kebutuhan perusahaan.
- 8) Pengembangan Program: Pelaksanaan peranan ini, pekerja sosial mengidentifikasi dan menerapkan program-program baru guna memenuhi kebutuhan perusahaan.